



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**

### **I. PENDAHULUAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada masyarakat.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Selain itu, ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RLPPD wajib disampaikan kepada masyarakat dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RLPPD memuat:

1. Capaian kinerja makro;
2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;



3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
4. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
5. Inovasi daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, yang disusun berdasarkan data dan informasi dari perangkat daerah, mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

## II. RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Capaian kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 beserta laju pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan 2025**

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	70,76	0,78
2.	Angka Kemiskinan	10,23	10,15	-0,08
3.	Angka Pengangguran	3,74	3,69	-0,05
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	5,31	0,67



5.	Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah) ADHB	25.916,29	28.081,29	2.165
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,363	0,363	0

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya dan Open Data Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

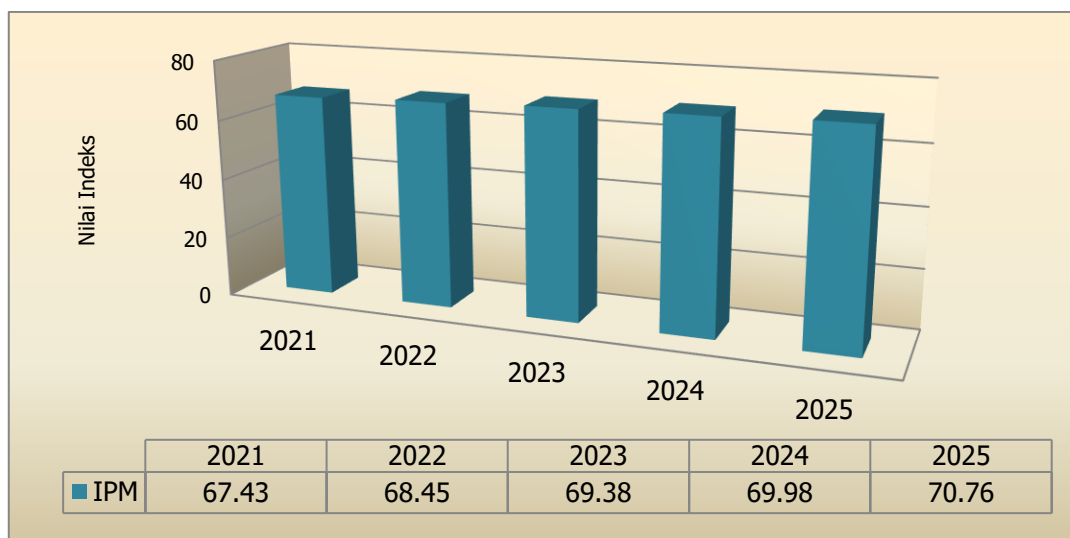
### 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Tasikmalaya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. IPM pada Tahun 2024 tercatat sebesar 69,98 dan meningkat menjadi 70,76 pada Tahun 2025.

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 2.1**  
**Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 - 2025**



( Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026)

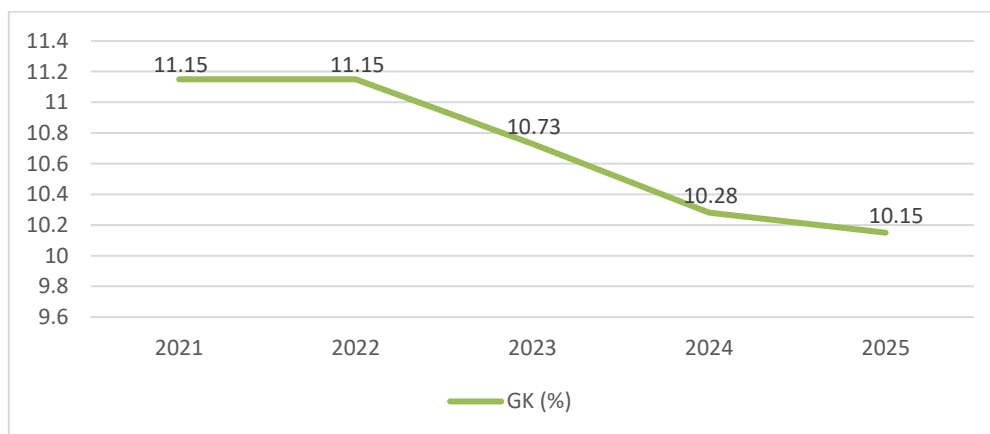


### 2.1.2. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan sebanyak 10,23 persen dan pada Tahun 2025 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 10,15 persen.

Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara gradual, meskipun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.2**  
**Grafik Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2025**



( Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

### 2.1.3. Angka Pengangguran

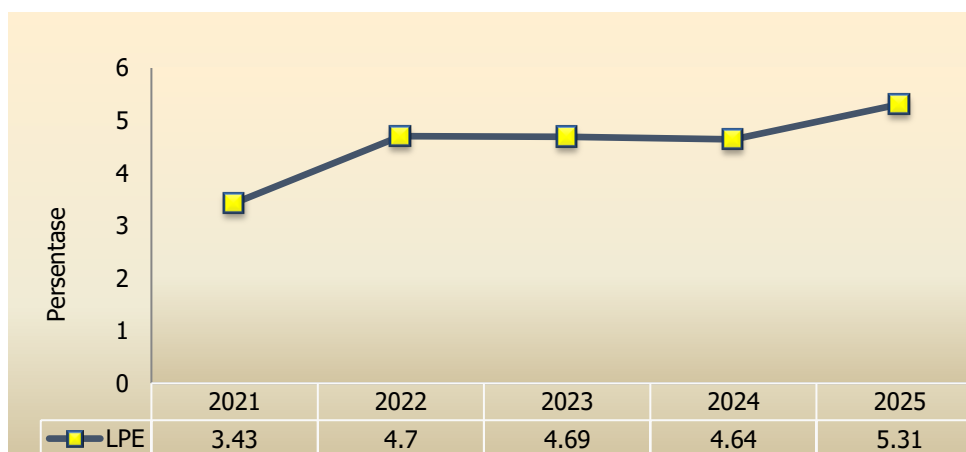
Angka Pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Open Data Kabupaten Tasikmalaya, Angka pengangguran pada Tahun 2024 sebesar 3,74 persen, menurun menjadi 3,69 persen pada Tahun 2025.



#### 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mencapai 5,31% meningkat signifikan dari 4,64% pada tahun 2024. Akselerasi pertumbuhan ini merupakan capaian yang membanggakan ditengah tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional, yang ditopang oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan perdagangan serta industri pengolahan termasuk kerajinan daerah yang terus bergeliat. Grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2025 disajikan kedalam gambar 2.3 di bawah ini.

**Gambar 2.3**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2025**



(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)  
Keterangan \*) Angka Sementara

#### 2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Secara agregat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Tasikmalaya pada periode Tahun 2021 hingga Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun.



**Tabel 2.2**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2025**

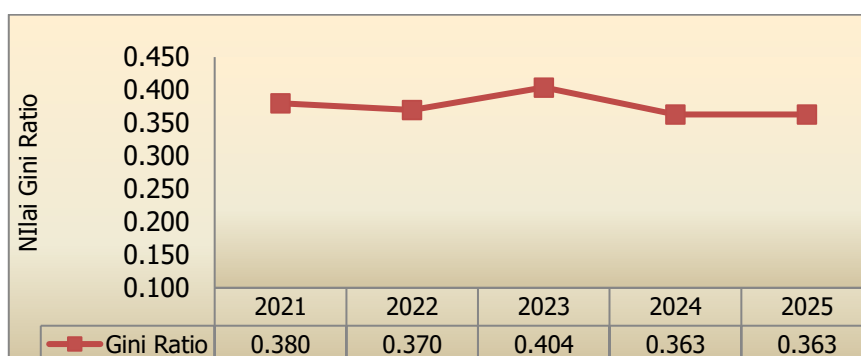
No.	Tahun	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	
		ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2021	20.931,26	13.415,55
2	2022	22.544,74	13.931,64
3	2023	24.172,46	14.472,21
4	2024	25.916,29	15.034,29
5	2025	28.081,29	15.726,45

Sumber : Open data Kabupaten Tasikmalaya

### 2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Pada tahun 2025 gini ratio terjaga pada angka 0,363 sama dengan capaian tahun 2024. Terjaganya angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat tidak mengalami perburukan di tengah tekanan ekonomi yang ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan manfaat pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi yang kita capai bersama. Grafik Perkembangan gini ratio Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2025 disajikan kedalam gambar 2.4 di bawah ini.

**Gambar 2.4**  
**Grafik Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2025**



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2026



## **2.2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar**

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola urusan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pada Tahun 2025, capaian kinerja urusan pelayanan dasar di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang ditandai dengan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pada berbagai sektor. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi beberapa bidang, antara lain:

### **2.2.1. Urusan Pendidikan**

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja urusan pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta perbaikan kualitas layanan pendidikan pada berbagai jenjang. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan.



Adapun capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pendidikan Tahun 2025**

No.	IKK Outcome	Capaian Tahun 2025
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,97 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,83 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	78,73 %
4	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	23,19 %
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	22,83 %

## **B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan**

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan layanan pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan.

Pada Tahun 2025, anggaran belanja urusan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Rp 1.385.040.308.033,00 dengan realisasi tercatat sebesar Rp 1.319.498.536.855,00 atau sebesar 95,27%.



## 2.2.2. Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025**

No.	IKK Outcome	Capaian Tahun 2025
1	Persentase Kematian Ibu	0,11 %
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	13,24 %
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	97,10 %
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,19 %
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	99,71 %
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,47 %
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100 %



## **B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan**

Pengalokasian belanja pada urusan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas di bidang kesehatan, baik dalam upaya peningkatan pelayanan dasar maupun penguatan fasilitas dan sumber daya kesehatan.

Pada Tahun 2025, anggaran belanja urusan kesehatan sebesar Rp 697.497.419.147,00, dengan realisasi mencapai Rp 648.502.413.192,42 atau sebesar 92,98%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### **2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung penyediaan infrastruktur serta penataan ruang yang berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

No.	IKK Outcome	Capaian Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	55,00 %
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	68,11 %
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	93,24 %
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	2,38 %
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100 %
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100 %

## **B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, anggaran belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditetapkan sebesar Rp 134.948.860.270,00 dengan realisasi mencapai Rp 127.121.738.748,00 atau sebesar 94,20 %. Realisasi tersebut menunjukkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan tata ruang daerah.



## 2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam meningkatkan kualitas hunian serta lingkungan permukiman yang layak.

Adapun capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025**

No.	IKK Outcome	Capaian Tahun 2025	Ket
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0 %	Luas kawasan kumuh yang ditangani tahun 2025 adalah yang diatas 10 Ha
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	46,03 %	
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	80 %	

### B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Tahun 2025, belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta lingkungan



permukiman yang layak. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.945.128.400,00, dengan realisasi mencapai Rp 1.939.597.400,00 atau sebesar 99,72%.

## 2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Adapun capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025**

No.	IKK Outcome	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33 %
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2,38 %



## **B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Alokasi belanja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 sebesar Rp 31.033.114.960,00, dengan realisasi mencapai Rp 29.326.376.457,00 atau sebesar 94,50%. Capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman dan tertib di Kabupaten Tasikmalaya.

### **2.2.6. Urusan Sosial**

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Adapun capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>IKK Outcome</b>	<b>Capaian Tahun 2025</b>
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %



4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %

## B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 tercatat sebesar 95,01% atau sebesar Rp 18.257.194.550,00 dengan jumlah anggaran Rp 19.215.796.787,00.

### 2.3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

#### 2.3.1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Timda Provinsi Jawa Barat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang bersifat umum terkait pemahaman terhadap definisi operasional maupun terkait pendataan untuk pemenuhan elemen data setiap indikator kinerja kunci perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Tasikmalaya masih harus diberikan pemahaman terkait definisi operasional setiap indikator kinerja kunci baik dalam pemenuhan eviden capaian kinerja maupun dalam memenuhi Capaian Kinerja di setiap IKK. Selain itu juga kondisi eksisting struktur organisasi disetiap perangkat daerah yang kaya fungsi bahwa hampir seluruh perangkat daerah mengampu lebih dari 3 urusan pemerintahan, juga berdampak pada Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci karena kecilnya kewenangan, terbatasnya sumberdaya manusia dan



terbatasnya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan kinerja setiap urusan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

### 2.3.2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan BPK, Kabupaten Tasikmalaya berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, yang berarti bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.

### 2.4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, realisasi pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 3.431.340.996.046,44 dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar Rp 3.348.266.750.198,42. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 163.964.888.791,58 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 129.803.047.353,00

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

No.	Uraian	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.527.058.874.909,00</b>	<b>3.431.340.996.046,44</b>	<b>97,29</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>488.106.339.375,00</b>	<b>436.070.469.702,44</b>	<b>89,34</b>
1.1.1	Pajak Daerah	187.959.000.531,00	167.182.537.897,00	88,95
1.1.2	Retribusi Daerah	31.409.507.999,00	29.386.118.187,93	93,56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.772.982.444,00	21.772.982.444,00	100,00



1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	246.964.848.401,00	217.728.831.173,51	88,16
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.013.521.785.534,00</b>	<b>2.970.017.931.511,00</b>	<b>98,56</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>2.788.947.044.054,00</b>	<b>2.749.641.851.506,00</b>	<b>98,59</b>
	Dana Perimbangan	2.382.256.229.054,00	2.374.016.305.076,00	99,65
	Dana Desa	399.560.320.000,00	368.495.051.430,00	92,23
	Insentif Fiskal	7.130.495.000,00	7.130.495.000,00	100,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>224.574.741.480,00</b>	<b>220.376.080.005,00</b>	<b>98,13</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	167.388.238.040,00	163.189.606.805,00	97,49
	Bantuan Keuangan	57.186.503.440,00	57.186.473.200,00	100,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.430.750.000,00</b>	<b>25.252.594.833,00</b>	<b>99,30</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.430.750.000,00	24.803.980.846,00	97,54
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	448.613.987,00	100,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.561.261.731.596,00</b>	<b>3.348.266.750.198,42</b>	<b>94,02</b>
2.1	BELANJA OPERASI	<b>2.657.958.021.922,00</b>	<b>2.497.095.422.653,42</b>	<b>93,95</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.585.258.362.595,00	1.474.798.277.694,00	93,03
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925.252.063.811,00	876.849.568.986,42	94,77
2.1.3	Belanja Hibah	142.422.595.516,00	140.542.775.973,00	98,68
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.025.000.000,00	4.904.800.000,00	97,61
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.841.828.632,00</b>	<b>197.967.119.593,00</b>	<b>94,79</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.642.500.000,00	811.788.236,00	49,42
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.199.858.321,00	80.747.897.307,00	93,68
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.764.856.441,00	22.276.586.540,00	93,74
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.791.360.000,00	65.742.668.155,00	95,57
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.346.094.870,00	27.294.990.130,00	99,81
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.097.159.000,00	1.093.189.225,00	99,64
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.868.578.082,00</b>	<b>27.740.237.775,00</b>	<b>89,87</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.868.578.082,00	27.740.237.775,00	89,87
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>663.593.302.960,00</b>	<b>625.463.970.177,00</b>	<b>94,25</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.136.182.960,00	11.105.600.000,00	61,23
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	645.457.120.000,00	614.358.370.177,00	95,18
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(34.202.856.687,00)</b>	<b>83.074.245.848,02</b>	<b>91,97</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.940.356.687,00</b>	<b>163.964.888.791,58</b>	<b>432,16</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.940.356.687,00	37.940.356.685,58	99,99
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	126.024.532.106,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.737.500.000,00</b>	<b>129.803.047.353,00</b>	<b>3.472,99</b>
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.737.500.000,00	3.737.500.000,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	126.065.547.353,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>34.202.856.687,00</b>	<b>34.161.841.438,58</b>	<b>99,88</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.236.087.286,60</b>	<b>0,00</b>

Sumber Data : BPKPD, LRA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 *Preliminary*



## 2.5. Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki inovasi sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Data Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
1.	UPTD Puskesmas Sukahening	Inovasi Pelayanan Publik	NON-DIGITAL	Ultrasonografi Mobile Dan Skrining Ibu Hamil Resiko Tinggi Di Posyandu ( <b>ULTRAMEN BIRU PUSKESMAS SUKAHENING</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	UPTD Puskesmas Sukahening	Inovasi Pelayanan Publik	NON-DIGITAL	Satuan Tugas Bersama Rangger Anti Stunting ( <b>SMART</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	UPTD Puskesmas Pagerageung	Inovasi Lainnya sesuai dengan urusan pemerintah an daerah	NON-DIGITAL	Jamban Idaman Masyarakat Tasikmalaya ( <b>JIMAT</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4.	RSUD Singaparna Medika Citrautama	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	Sistem Informasi Manajemen Dan PelayanAn KesehatAn TeRpadu Rumah Sakit ( <b>SIMPAKAR- RS</b> )	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	



5.	UPTD Puskesmas Parungponteng	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	Sistem Informasi Posyandu ( <b>SIMADU</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
6.	UPTD Puskesmas Sukaratu	Inovasi Pelayanan Publik	NON-DIGITAL	Pelayanan Integrasi Kesehatan Masyarakat GalungguNG Menuju Raga Dan JiWA YaNG SehAt Dan Produktif ( <b>PISANG RANGAP</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	Pelayanan Dan Perlindungan Kekerasan Perempuan Dan Anak ( <b>PELUKAN</b> )	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota/Kabupaten	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	Melayani Daring Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( <b>MEDAR KACAPI</b> )	Penerapan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	NON-DIGITAL	Rekaman Disabilitas Jompo Dan ODGJ Di Desa Terpencil ( <b>REK DISAMPO SANSIL</b> )	Penerapan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	CAPIL ONLINE DESA ( <b>COD</b> )	Penerapan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	



11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	DIGITAL	PELAYANAN TERINTEGRASI ADMINDUK DARI PUSKESMAS (PETI KEMAS)	Penerapan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK KEGIATAN Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
-----	-----------------------------------------	--------------------------	---------	-------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### III. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran yang disampaikan kepada masyarakat sebagai realisasi tahunan dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada hakikatnya, pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, perguruan tinggi, tokoh agama, insan pers, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada alamat [www.tasikmalayakab.go.id](http://www.tasikmalayakab.go.id). Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



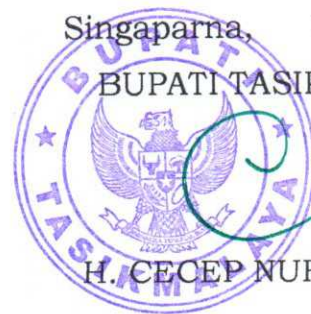
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya kepada kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Singaparna,           Maret 2026

BUPATI TASIKMALAYA



H. CECEP NURUL YAKIN